Media Komunikasi dan Inspirasi

JENDELA
Pendidikan dan Kebudayaan

IX/Maret - 2017

14 | Komitmen Bantu Ketersediaan Fasilitas Pendidikan
15 | Empat Program untuk Penguatan
27 | Indonesia Jadi Negara Tamu Pertama di Asia Tenggara

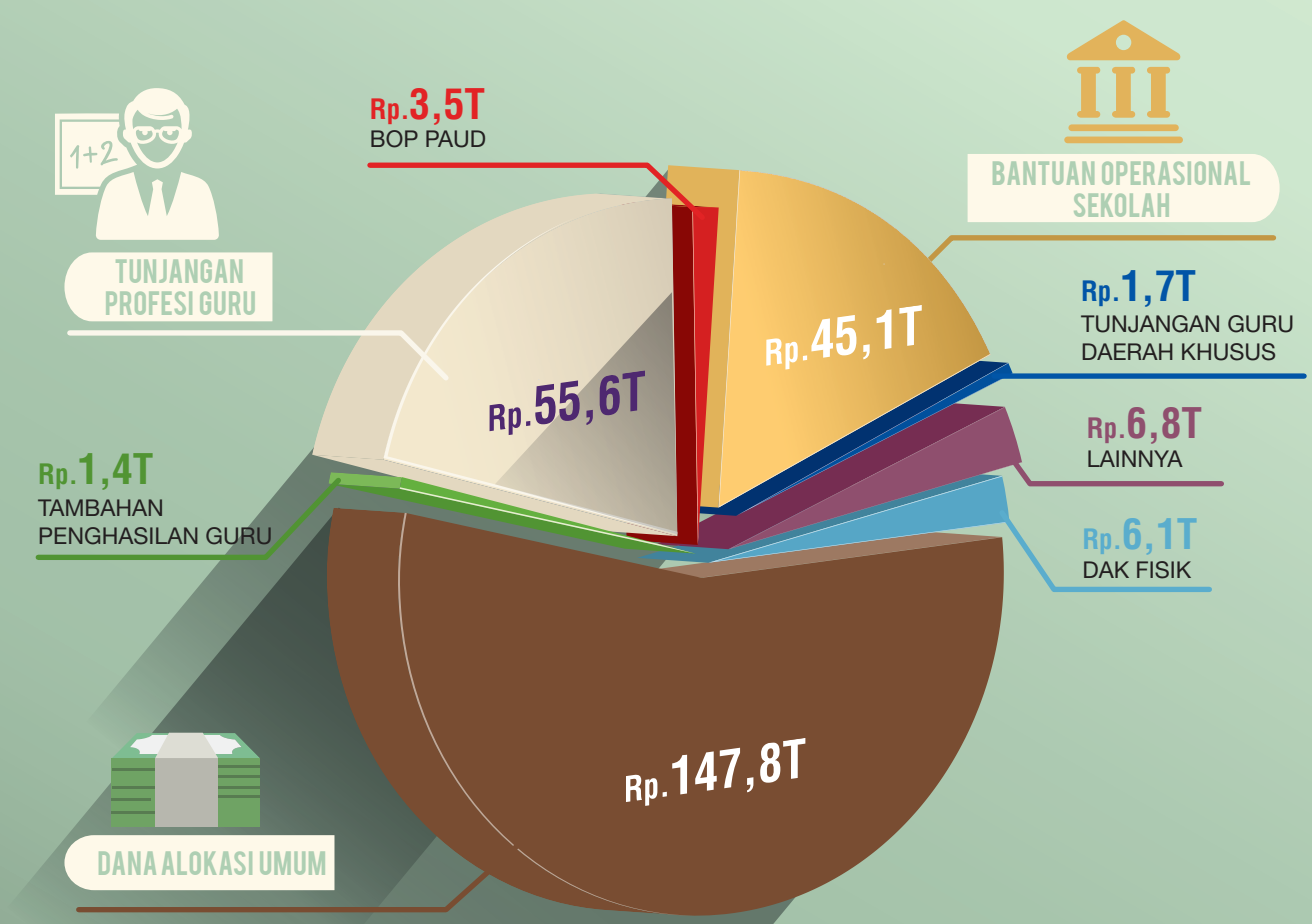

KE MANA ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN 2017 DIALOKASIKAN?

Daftar Isi

05 **Salam Pak Menteri**

06 Anggaran Fungsi Pendidikan 2017
64 Persen Lebih untuk Pembiayaan Pendidikan di Daerah

08 **Kemendikbud Kelola Rp 39,82 Triliun Anggaran Pendidikan**

10 Program Indonesia Pintar (PIP)
Ringankan Beban SiswaYatim Piatu

11 Penguatan Vokasi
Meningkatkan Daya Saing SDM dengan Penguatan Pendidikan Vokasi

12 Penguatan Pendidikan Karakter
Siapkan Generasi Muda yang Tangguh, Cerdas, dan Berkarakter

13 Peningkatan Akses Pendidikan
Bentuk Intervensi Kementerian untuk Daerah Tertinggal

14 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Komitmen Bantu Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

15 Substansi Pendidikan dan Kebudayaan
Empat Program untuk Penguatan

16 PAUD, Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Keluarga
Jalankan Program untuk Perluasdan Tingkatkan Mutu

17 **Refleksi 2016**

21 Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)
GTK Profesional dan Sejahtera Wujudkan Pembelajaran Bermutu

22 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Perkuat Karakter Bangsa Melalui Bahasa Indonesia

23 Program Kebudayaan
Landasan Perencanaan Pembangunan Pendidikan Berkelanjutan

24 Beasiswa
Tersedia Rp 252,1 Miliar untuk Beasiswa Bagi yang Berprestasi

25 RESENSI BUKU
Membuat Perbedaan, Menjadi Guru Berkualitas

26 Infografis Perpustakaan

27 Festival Europalia 2017-2018
Indonesia Jadi Negara Tamu Pertama di Asia Tenggara

30 Kajian
Dukungan Pendanaan yang Baik, Ciptakan Lembaga PAUD Berkualitas

33 Bangga Berbahasa Indonesia
Penggunaan Kata Depan dan Awalan di dan ke yang Benar

34 **Senarai Kata Serapan**

Sapa Redaksi

Tahun 2017 telah kita jelang. Sebelum menapaki lebih jauh tahun yang baru ini, ada baiknya kita merefleksikan diri, melihat kembali apa yang telah kita kerjakan dan bagaimana hasilnya. Di akhir 2016 yang lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy memaparkan capaian target berbagai program prioritas nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Alhamdulillah, dari keseluruhan program yang dikerjakan sepanjang 2016, banyak di antaranya yang mencapai target, bahkan ada pula realisasi pelaksanaan yang melebihi target. Tentu ini semua berkat kerja sama para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga ada keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk melihat sejauh mana capaian Kemendikbud hingga akhir 2016, *JENDELA* sajikan cuplikannya dalam empat halaman di bagian tengah majalah ini sebagai bagian dari informasi yang berhak diketahui masyarakat luas.

Kita patut bersyukur, 2016 dapat dilalui dengan baik. Tahun 2017 juga tentu harus kita lalui dengan prestasi yang lebih baik lagi. Dari total anggaran fungsi pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp 416,09 triliun, sebanyak 64,45 persen di antaranya masuk dalam dana transfer daerah. Sementara sisanya terbagi-bagi dalam 20 kementerian/lembaga yang mengurusi bidang pendidikan dan kebudayaan.

Anggaran transfer daerah yang dimaksud adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu pembiayaan kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan. Tahun ini alokasi transfer daerah itu lebih besar ketimbang 2016 lalu.

Selain informasi mengenai anggaran transfer daerah itu, *JENDELA* edisi perdana di 2017 ini juga menyajikan program-program prioritas Kemendikbud sebagai mendukung Nawacita di bidang pendidikan dan kebudayaan. Itulah yang kami sajikan dalam rubrik fokus kali ini. Program prioritas tersebut disajikan lengkap dengan target capaian masing-masing.

Di rubrik kebudayaan, kami sajikan informasi mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Festival Europalia 2017-2018. Yang istimewa dalam festival seni terbesar di dunia itu, Indonesia terpilih sebagai negara tamu (*guest country*). Kesempatan itu tidak akan disia-siakan. Indonesia dipastikan akan tampil dengan beragam sajian budaya, seni, kuliner khas. Tujuannya adalah untuk mempromosikan Indonesia pada jutaan mata masyarakat Eropa dan belahan dunia lainnya.

Sementara itu pada rubrik resensi buku, *JENDELA* hadirkan koleksi terbaru di Perpustakaan Kemendikbud. Buku berbahasa Inggris berjudul "Teaching: Making a Different" dapat menjadi referensi bagi para calon guru untuk memiliki metode pembelajaran yang "berbeda" saat berhadapan dengan siswa generasi milenial.

Seperti pada edisi-edisi terdahulu, *JENDELA* juga tetap menghadirkan rubrik kajian yang berisi artikel ringan hasil penelitian yang disajikan dengan bahasa populer. Ada pula rubrik Bangga Berbahasa Indonesia sebagai sajian penutup yang ringan untuk dibaca. Di rubrik ini kami hadirkan kembali kesadaran kita sebagai masyarakat Indonesia untuk selalu mencintai bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Kami berharap, sajian yang kami hadirkan pada edisi kali ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi siapa pun yang membutuhkan. Selamat membaca. Salam.

Redaksi

REDAKSI

Pelindung:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy
Penasihat: Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi
Pengarah Konten: Staf Khusus Mendikbud, Nasrullah
Penanggung Jawab: Ari Santoso
Pemimpin Redaksi: Luluk Budiyono
Redaktur Pelaksana: Emi Salpiati
Staf Redaksi: Ratih Anbarini, Aline Rogeleonick, Desliana Maulipaksi, Agi Bahari, Gloria Gracia, Seno Hartono, Dwi Retnawati
Fotografi, Desain & Artistik: BKLM

Sekretariat Redaksi
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM), Kemendikbud, Gedung C Lantai 4,
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,
Telp. 021-5711144 Pes. 2413

Kemdikbud.go.id
Kemdikbud.RI
@kemdikbud_RI
KEMENDIKBUD RI

SALAM PAK MENTERI

Istimewanya tahun ini, Presiden menginginkan PIP juga khusus dialokasikan bagi anak usia sekolah dengan status yatim dan yatim piatu, baik yang tinggal di panti asuhan maupun di luar panti asuhan. Selama ini, Kemendikbud mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan kemampuan finansial keluarga siswa, bukan berdasarkan status yatim atau yatim piatu.

Tahun 2016 telah berlalu. Kini kita memasuki tahun yang baru, tahun 2017. Semangat dan komitmen untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia akan terus kita jaga, bahkan tingkatkan. Tahun ini Kemendikbud mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 39,82 triliun. Hampir 90 persen dari anggaran itu dirancang untuk program-program pendidikan dan kebudayaan yang langsung menyasar masyarakat. Salah satunya Program Indonesia Pintar (PIP).

Istimewanya tahun ini, Presiden menginginkan PIP juga khusus dialokasikan bagi anak usia sekolah dengan status yatim dan yatim piatu, baik yang tinggal di panti asuhan maupun di luar panti asuhan. Selama ini, Kemendikbud mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan kemampuan finansial keluarga siswa, bukan berdasarkan status yatim atau yatim piatu.

Mengapa yatim piatu? Saya teringat dengan kandungan Al-qur'an dalam surat Al Ma'un tentang bagaimana seharusnya kita mencintai anak yatim dan fakir miskin. Ketika mereka kehilangan kasih sayang dari orangtuanya, tentu harus ada orang lain yang menggantikan peran tersebut, dan negara harus hadir menolong dan menyayangi mereka. Salah satu cara menyayangi mereka adalah dengan memberikan alokasi KIP secara khusus kepada anak-anak yatim dan yatim piatu ini.

Tahun lalu, KIP untuk anak yatim dan yatim piatu terdistribusi sebanyak 158.933. Tahun 2017, ditargetkan sebanyak 736.848 KIP dapat terdistribusi. Jadi, jika ditotal, maka pendistribusian KIP untuk anak yatim dan yatim piatu se-Indonesia adalah sebanyak 896.781.

Ini dilakukan agar bagi anak yatim dan yatim piatu yang sebelumnya putus sekolah dapat ditarik lagi untuk bersekolah. Sementara bagi mereka yang memang sudah bersekolah, dana PIP yang diterima dapat digunakan untuk membantu membiayai kebutuhan sekolah.

Sungguh sebuah kehormatan bagi Kemendikbud saat Bapak Presiden Joko Widodo membagikan langsung KIP kepada anak-anak yatim piatu sebagai wujud kasih sayangnya kepada mereka. Pada pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2017, di Kemayoran, Jakarta, 26 Januari 2017, Presiden menyerahkan KIP kepada 2.844 anak yatim dan yatim piatu dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Esok harinya di Magelang, Jawa Tengah, KIP dibagikan Presiden kepada 1.083 anak. Saat kunjungan kerja ke Boyolali, Jawa Tengah, Presiden kembali membagikan sebanyak 1.067 KIP kepada anak-anak yatim dan yatim-piatu di sana. Berlanjut, pada 8 Februari, Presiden juga menyerahkan 236 KIP kepada anak yatim dan yatim piatu dalam acara Penyerahan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

Alhamdulillah, karena Kemendikbud sudah mengantongi data anak yatim yang berada di panti asuhan dengan baik, maka tidak sulit bagi Kemendikbud mendistribusikan KIP kepada mereka. Saya sangat berharap, pengurus panti asuhan dapat melaporkan anak-anak asuhannya ke sekolah, sehingga mereka dapat kembali bersekolah setelah menerima KIP. Semakin banyak anak yang kembali ke sekolah, semakin cerah juga masa depan mereka kelak.

Ikhtiar ini merupakan upaya membangun pendidikan dan kebudayaan yang merata, berkeadilan, dan berkualitas. Karena tujuannya baik, Insya Allah, kita berdoa agar kebijakan ini berjalan dengan lancar dan semua anak yang berhak mendapatkannya bisa memeroleh manfaat. Semoga. (*)

Anggaran Fungsi Pendidikan 2017

64 Persen Lebih untuk Pembiayaan Pendidikan di Daerah

Anggaran fungsi pendidikan di 2017 tetap dipertahankan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fokusnya pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan. Besaran anggaran fungsi pendidikan ini mencapai Rp 416,09 triliun. Dari total anggaran tersebut, 64,4 persennya ditransfer langsung ke daerah untuk membantu pembiayaan kebutuhan pendidikan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Harapannya agar pendidikan merata, berkeadilan, dan berkualitas.

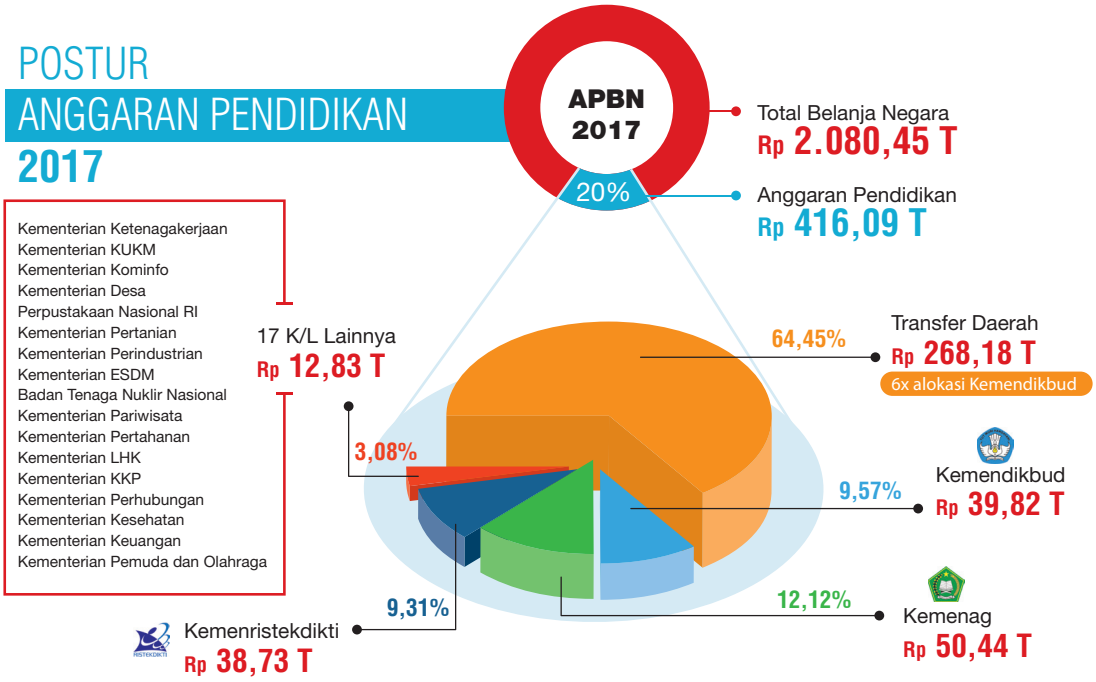

Anggaran pendidikan tahun ini memang turun dibandingkan tahun lalu. Jika pada 2016, anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 419,2 triliun, tahun ini turun menjadi Rp 416,09 triliun. Meski turun, namun anggaran yang ditransfer ke daerah justru naik 0,12 persen atau sebesar Rp 268,18 triliun. Besarnya anggaran yang ditransfer ke daerah ini guna memperkuat implementasi Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran.

Anggaran tersebut terbagi dalam delapan bagian, yaitu Rp 147,8 triliun untuk dana alokasi umum (DAU); Rp 1,4 triliun untuk tambahan penghasilan guru; Rp 55,6 triliun untuk tunjangan profesi guru; Rp 3,5 triliun untuk Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP); Rp 45,1 triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Rp 1,7 triliun untuk tunjangan guru daerah khusus; Rp 6,1 triliun untuk dana alokasi khusus (DAK), dan sisanya Rp 6,8 triliun digunakan untuk pembiayaan lainnya.

Meskipun daerah menerima anggaran tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengingatkan agar pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran pendidikan di daerahnya sekurang-kurangnya 20 persen dari Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana amanat undang-undang.

"Yang terjadi di lapangan, banyak daerah yang mendapat transfer dana berupa DAU dan DAK

Kenaikan Anggaran Transfer Daerah dalam Tiga Tahun Terakhir

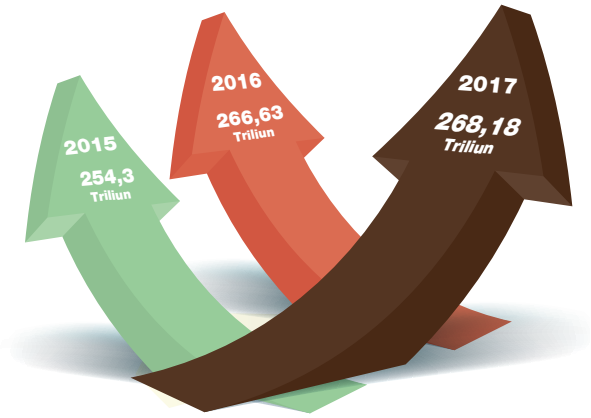

kemudian dimasukan dalam postur pendidikan anggaran daerah yang 20 persen itu. Padahal seharusnya anggaran 20 persen itu berasal dari APBD murni," jelasnya.

Hal ini bisa dikecualikan bagi daerah-daerah tertentu yang memang dalam kondisi darurat sehingga tidak bisa mengalokasikan minimal 20 persen untuk anggaran pendidikan. Bagi daerah-daerah ini, Kemendikbud bisa melakukan program afirmatif. "Nanti dilihat kabupaten mana yang alokasi untuk bidang pendidikannya rendah. Tapi kalau semua mengaku rendah tidak ada satu pun yang mengalokasikan, ini kan bikin repot," ujarnya.

Mendikbud menambahkan, dana yang diberikan melalui transfer daerah itu bersifat stimulan. Pihaknya ingin ini dijadikan sebagai kontraprestasi untuk daerah yang telah memberikan komitmen pada pembangunan sektor pendidikan, terutama dalam pemanfaatan DAU dan DAK pendidikan. "Jadi nanti kalau bentuknya kontraprestasi, ada semacam penghargaan untuk mereka yang betul-betul komitmen dan kita kenai penalti untuk mereka yang tidak memiliki komitmen," tutur Mendikbud.

Desentralisasi Pendidikan

Mendikbud mengungkapkan, sejak lama telah diberlakukan otonomi daerah, sehingga pendidikan menjadi kewenangan daerah. Namun, masyarakat awam masih berpikir bahwa apapun yang terkait dengan pendidikan, maka menjadi tanggung jawab Kementerian. "Masyarakat banyak yang belum paham bahwa sebenarnya urusan pendidikan itu sudah didelegasikan atau dilimpahkan ke daerah, pemerintah provinsi atau kabupaten/kota," kata Mendikbud.

Contohnya untuk penanganan sekolah-sekolah yang rusak. Ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukan Kemendikbud. Anggaran transfer daerah inilah yang salah satunya bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah-sekolah rusak itu. (*)

BELANJA TRANSFER DAERAH 2017

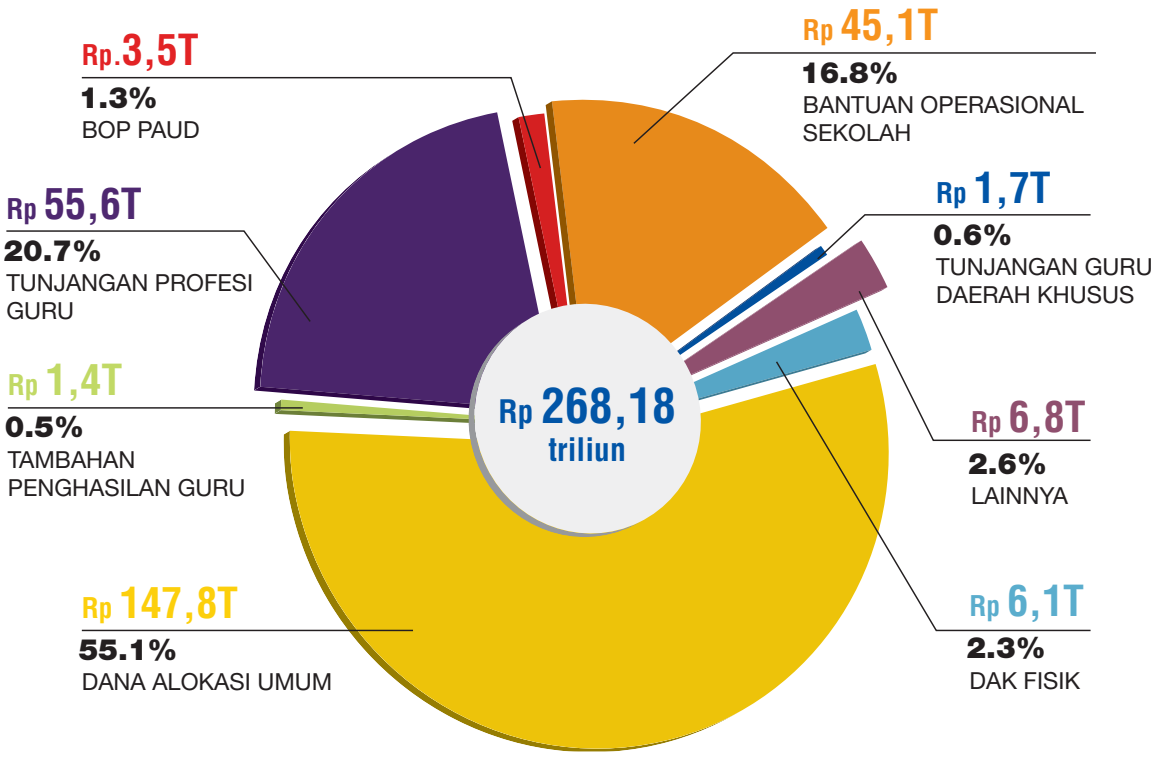

Kemendikbud Kelola Rp 39,82 Triliun

90 Persen Lebih untuk Program Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Anggaran yang dikelola Kemendikbud Tahun 2017

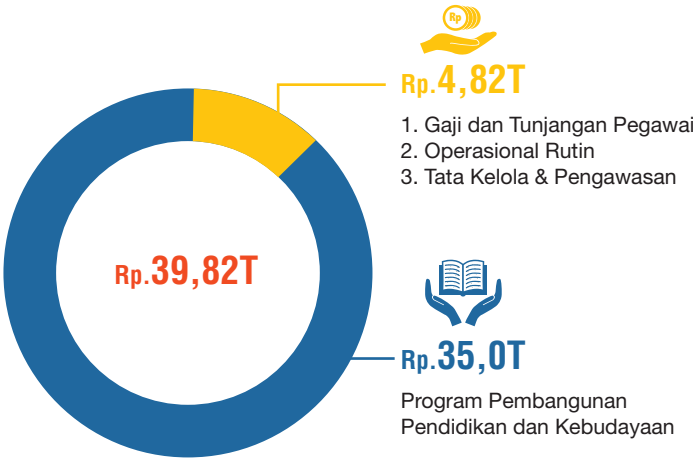

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendapat alokasi senilai Rp 39,82 triliun atau 9,57 persen dari anggaran fungsi pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Dari jumlah tersebut, hampir 90 persen di antaranya atau setara dengan Rp 35 triliun digunakan untuk melaksanakan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

Di antara program pembangunan pendidikan dan kebudayaan itu, ada tiga program prioritas nasional yang merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Ketiga program prioritas nasional itu adalah meningkatkan pendidikan yang berkeadilan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), dan revitalisasi pendidikan kejuruan/vokasi.

Tahun ini, sasaran penerima manfaat PIP ditargetkan sebanyak 16.487.872 anak dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp 8,8 triliun. Sementara untuk PPK, target yang disasar untuk implementasi sebanyak 9.830 sekolah di 34 provinsi, dengan total anggaran sebesar Rp 130,2 miliar. Adapun untuk revitalisasi pendidikan vokasi, anggaran yang disiapkan mencapai Rp 614,1 miliar yang digunakan di antaranya untuk pengembangan 150 SMK, pengiriman training guru SMK ke luar negeri, dan program keahlian ganda.

Selain tiga program prioritas itu, ada pula program-program prioritas Kemendikbud lainnya yang menjadi bagian dari pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Ini terbagi ke dalam delapan program, yaitu (1) peningkatan akses pendidikan dengan anggaran Rp 5,1 triliun; (2) peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan (Rp 3,2 triliun); (3) penguatan substansi pendidikan dan kebudayaan (Rp 2,1

Alokasi Anggaran di Kemendikbud

triliun); dan (4) program pendidikan anak usia dini (PAUD), keaksaraan, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan keluarga (Rp 549,5 miliar).

Empat program lainnya yang juga dilakukan selama 2017, yaitu (5) guru dan tenaga kependidikan dengan nilai anggaran Rp 8,2 triliun; (6) bahasa (Rp 151,1 miliar); (7) kebudayaan (Rp 485,9 miliar); dan (8) beasiswa (Rp 252,1 miliar).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menegaskan, penggunaan anggaran di Kemendikbud akan tetap dilakukan dengan transparan dan akuntabel. "Kemendikbud sebagai tulang punggung penyangga moral bangsa ini, karena kita bergerak di bidang pendidikan, kita harus menjadi contoh untuk yang lainnya," ujarnya.

Sebagai informasi, Laporan Keuangan Kemendikbud dalam tiga tahun terakhir (2013, 2014, dan 2015) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sementara untuk tahun anggaran 2016, hasil penilaiannya baru akan diumumkan oleh BPK RI pada Mei 2017.

Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemendikbud naik dari predikat B tahun 2014 dengan skor 72,2 menjadi predikat BB pada tahun 2015 dengan skor 73,4. Prestasi ini, kata Mendikbud, akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. (*)

Program Indonesia Pintar (PIP)

Ringankan Beban Siswa Yatim Piatu

Mulai 2017, Kemendikbud memulai proses distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak yatim dan yatim-piatu, baik yang berada di panti asuhan maupun di luar panti asuhan. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna, awal Januari lalu. Sebanyak 736.848 anak yatim dan yatim-piatu menjadi target sasaran penerima KIP tahun ini.

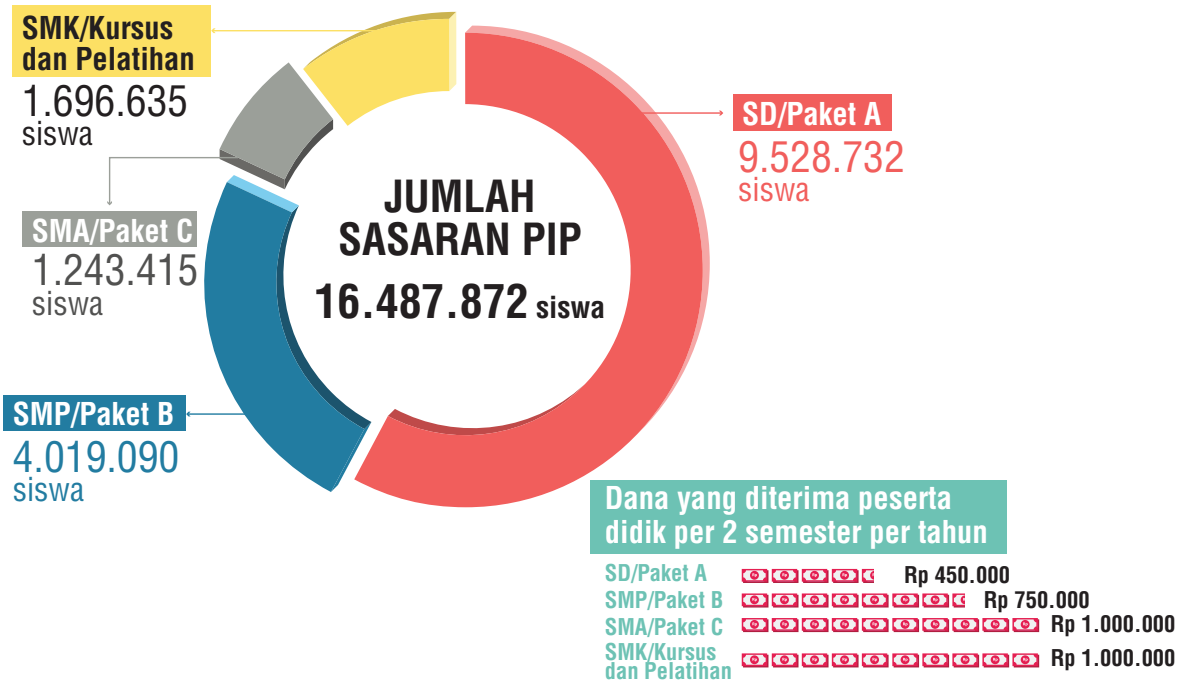

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu program yang menjadi sasaran prioritas nasional. Bahkan, alokasi anggaran untuk PIP menjadi angka terbesar di antara program prioritas lainnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sebanyak Rp 8,8 triliun dianggarkan khusus untuk PIP.

Tahun ini, isu pemerataan menjadi fokus pemerintah dalam menjalankan program prioritas nasional, termasuk pemerataan layanan dan kualitas pendidikan. Fokus pemerataan tersebut salah satunya direalisasikan melalui distribusi KIP untuk anak yatim dan yatim-piatu. Total penerima KIP pada tahun 2017 berjumlah 16.487.872 juta anak, dan sebanyak 736.848 di antaranya berasal dari kategori anak yatim dan yatim-piatu.

Sebagai program prioritas nasional, PIP menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Bahkan KIP yang diperuntukkan khusus untuk kategori anak yatim dan yatim-piatu, ikut dibagikan Presiden Jokowi secara langsung. Dalam setiap kunjungan kerjanya ke berbagai daerah, Presiden kerap mengagendakan pembagian KIP sekaligus menyempatkan diri bertemu dengan mereka. Pembagian KIP kepada siswa yatim piatu merupakan upaya membangun pendidikan dan kebudayaan yang merata, berkeadilan, dan berkualitas. (*)

Penguatan Pendidikan Vokasi

Meningkatkan Daya Saing SDM dengan Penguatan Pendidikan Vokasi

Presiden Joko Widodo beberapa kali menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pendidikan vokasi atau pendidikan kejuruan sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Pendidikan vokasi merupakan penggabungan antara teori dan praktik secara seimbang dengan orientasi pada kesiapan kerja lulusannya. Keseriusan pemerintah dalam penguatan pendidikan vokasi salah satunya dibuktikan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia.

Sasaran Penguatan Pendidikan Vokasi

50 Sekolah	Pengembangan SMK Kelautan	220 Sekolah	Pengembangan *Teaching Factory & Techno Park*	2.500 Lembaga	Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Nasional
50 Sekolah	Pengembangan SMK Pariwisata	1.540 Sekolah	SMK yang Bekerjasama dengan Industri	50.000 Orang	Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)
100 Sekolah	Pengembangan SMK Pertanian	1.280 Sekolah	SMK yang Melakukan Penyelarasan Kejuruan	40.000 Orang	Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)

Pendidikan vokasi dinilai sebagai pendidikan yang sangat diperlukan sekarang untuk menjawab kebutuhan pasar, sekaligus untuk menghadapi era kompetisi, misalnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah dimulai sejak tahun 2015. Sebagai salah satu program prioritas nasional, Kemendikbud menganggarkan Rp 614,1 miliar untuk penguatan vokasi ini. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk pengembangan SMK Kelautan, SMK Pariwisata, dan SMK Pertanian; pengembangan Teaching Factory dan Techno Park; kerja sama dengan industri; Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK); dan pengembangan lembaga kursus dan pelatihan berstandar nasional.

Selain itu, usaha penguatan pendidikan vokasi dilakukan dengan menjalin koordinasi antara Kemendikbud dengan kementerian terkait lain. Saat ini juga sedang dirumuskan Peta Jalan Revitalisasi Pendidikan Vokasional oleh Tim Penyusun Peta Jalan Revitalisasi Pendidikan Vokasional yang terdiri dari lintas kementerian/lembaga (K/L) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) K/L terkait.

Kemendikbud juga telah menyepakati nota kesepahaman dengan empat kementerian lain, yaitu Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN. Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi kerja sama dengan industri dalam rangka pengembangan pendidikan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri, restrukturisasi program keahlian dan kurikulum pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri, dan pembangunan infrastruktur kompetensi bidang industri.

Penguatan vokasi juga dilakukan pada Direktorat Pembinaan Khusus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat. Kemendikbud menetapkan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PW) untuk 40.000 orang serta penguatan Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar dengan sasaran 2.500 lembaga. (*)

Penguatan Pendidikan Karakter

Siapkan Generasi Muda yang Tangguh, Cerdas, dan Berkarakter

Dalam menyiapkan Generasi Emas 2045, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya mempercepat peningkatan kecakapan abad 21 bagi peserta didik melalui Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). PPK menempatkan karakter sebagai ruh pendidikan yang berdampingan dengan intelektualitas dalam pembentukan generasi muda yang tangguh, cerdas, dan berkarakter.

Untuk mendukung PPK, Pemerintah melalui Kemendikbud mengalokasikan anggaran sebesar Rp 130,21 miliar tahun ini. PPK menjadi satu dari tiga program prioritas nasional yang mendapat arahan khusus dari Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden, pendidikan karakter harus terus diajarkan dan dipupuk kepada siswa, mengingat perubahan kultur budaya barat dan negara-negara lain mulai menyerang kebhinekaan.

Pada 2016, Kemendikbud telah mengukuhkan 542 sekolah pada jenjang SD dan SMP menjadi sekolah rintisan dalam penerapan PPK. Sekolah-sekolah itu diharapkan menjadi contoh dan mampu menularkan praktik baik penerapan PPK bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Tahun 2017, Kemendikbud menargetkan sebanyak 1.626 sekolah untuk menjadi sekolah rintisan penerapan PPK selanjutnya yang akan memberikan dampak bagi 9.830 sekolah di sekitarnya. Implementasi PPK yang dilakukan secara mandiri dan bertahap ini pun disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan di masing-masing sekolah serta kearifan lokal di setiap daerahnya.

Melalui anggaran tersebut, Kemendikbud akan menyasar sekitar 82.024 peserta didik mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai Sekolah Menengah termasuk orangtua sebagai pendidik utama dan pertama di lingkungan keluarga. Tidak hanya itu, sebanyak 210 sekolah pada jenjang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di berbagai wilayah di Indonesia pun menjadi sasaran dalam implementasi gerakan PPK ini. Para siswa tersebut akan difokuskan dalam kegiatan-kegiatan yang mengandung lima nilai utama karakter dalam gerakan PPK yang meliputi religius, nasionalis, integritas, dan mandiri serta gotong royong. (*)

Sasaran Penguatan Pendidikan Karakter

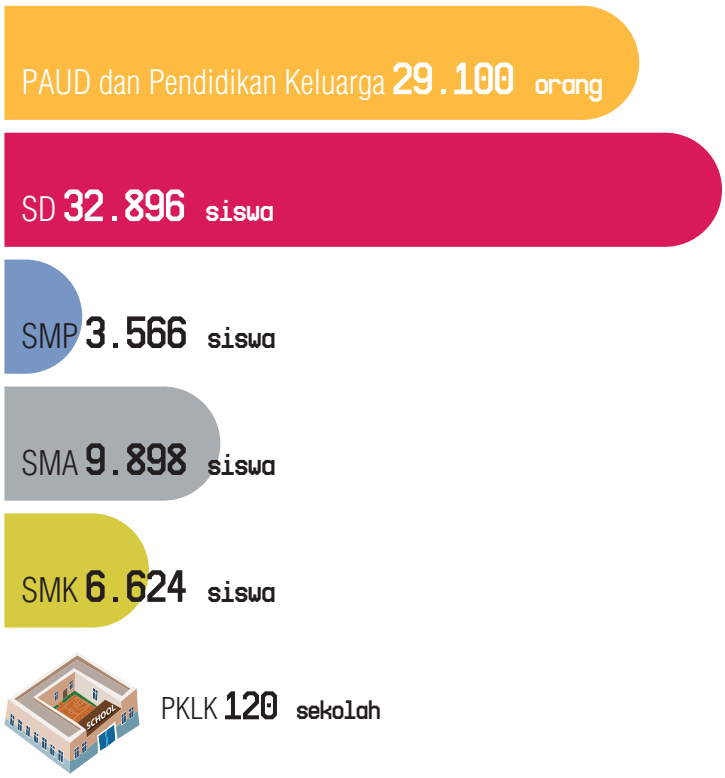

Peningkatan Akses Pendidikan

Bentuk Intervensi Kementerian untuk Daerah

Meskipun urusan pendidikan telah menjadi kewenangan pemerintah daerah, namun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap melakukan intervensi kepada daerah yang masih membutuhkan bantuan. Daerah dengan anggaran terbatas biasanya sulit mengalokasikan dana untuk program rehab sekolah. Di sinilah Kemendikbud turut hadir membantu daerah-daerah tersebut.

Infrastruktur sekolah yang memadai menjadi bagian integral pembangunan pendidikan. Ruang kelas yang baik tentu berdampak positif pada psikologis anak selama pembelajaran di sekolah. Bagi daerah dengan kemampuan fiskal dan komitmen pendanaan pendidikan yang kuat, memastikan infrastruktur dalam kondisi baik bukanlah perkara sulit. Sebaliknya, walaupun memiliki komitmen baik, daerah yang memiliki ruang fiskal sempit tetap kewalahan dalam penyediaan sarana pendidikan tersebut.

Kemendikbud berkomitmen membantu pemerintah daerah untuk memastikan gedung sekolah dan ruang kelas dalam kondisi baik. Setiap tahun Kemendikbud menganggarkan program peningkatan akses pendidikan berupa renovasi sekolah, pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru, serta revitalisasi. Bantuan juga diberikan pada SMK dan SMP berbasis komunitas/pesantren.

Tahun 2017 ini anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp 5,1 triliun. Target tahun ini sebanyak 39.906 ruang kelas direhabilitasi, 210 unit sekolah baru, 2.625 pembangunan ruang kelas baru, dan 305 ruang direvitalisasi. Sementara itu, bantuan yang diberikan pada SMK dan SMP berbasis komunitas/pesentren masing-masing sebanyak 175 paket dengan total Rp 133 miliar dan 375 paket dengan total Rp 23 juta.

Bantuan-bantuan yang diberikan Kemendikbud diharapkan menjawab harapan masyarakat akan kebutuhan tempat belajar yang baik. Infrastruktur sekolah yang memadai membawa siswa dan guru pada iklim belajar yang kondusif. Siswa dapat belajar dengan tenang dan guru fokus mendidik siswa-siswanya. (*)

Sasaran Peningkatan Akses Pendidikan

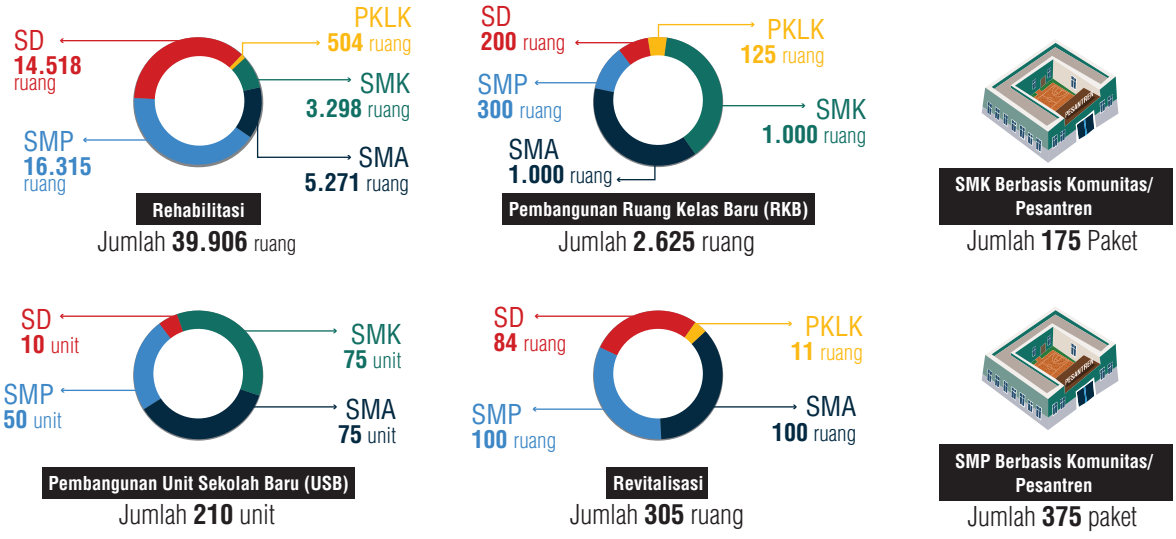

Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Komitmen Untuk Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat dari tingkat akreditasi sebuah lembaga pendidikan. Selain manajemen sekolah yang baik, dukungan sarana dan prasarana juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya mutu pendidikan. Meningkatkan dan menjamin mutu pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi untuk selalu berupaya meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya dengan menjamin ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai.

Komitmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk turut meningkatkan mutu pendidikan di daerah, salah satunya dapat dilihat dari jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program ini. Sebanyak Rp 3,21 triliun digelontorkan yang ditujukan untuk akreditasi sekolah, bantuan laboratorium/ruang praktik, perpustakaan, Unit Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan pendidikan, dan bantuan sarana prasarana/sapras lainnya untuk mendukung pengembangan pendidikan karakter.

Program akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Tahun ini, terdapat dua jenis alokasi anggaran bagi akreditasi, yaitu akreditasi sekolah dengan alokasi untuk 30.000 lembaga dan akreditasi Pendidikan Non Formal (PNF) yang menyasar 10.000 sekolah.

Dukungan terhadap sarana dan prasarana yang memadai untuk pembelajaran juga bagian dari peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Bantuan diberikan untuk memfasilitasi 2.077 ruang praktik siswa atau laboratorium. Sementara, fasilitas ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dalam bentuk perpustakaan juga turut menjadi perhatian. Tahun ini sasaran alokasi diberikan untuk 1.291 ruang perpustakaan.

Di sisi lain, kesehatan peserta didik juga mendukung peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Untuk itulah Kemendikbud membantu memfasilitasi sebanyak 389 Unit Kesehatan Sekolah (UKS), mulai jenjang SD hingga sekolah menengah. Dukungan tersebut semata-mata diberikan untuk membantu satuan pendidikan di daerah mencapai mutu pendidikan yang baik. Harapannya ini dapat berimbas pada peningkatan mutu daerah tempat sekolah tersebut berada. (*)

Sasaran Program dan Penjaminan Mutu Pendidikan

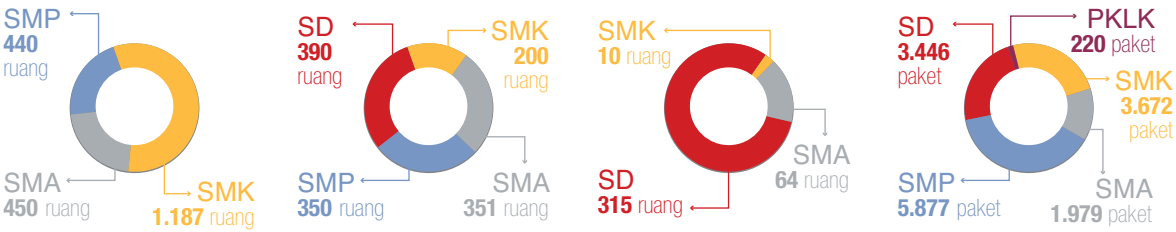

Laboratorium/Ruang Praktik Jumlah **2.077** ruang

Perpustakaan Jumlah **1.291** ruang

UKS Jumlah **389** ruang

Peralatan Pendidikan Jumlah **15.194** paket

Akreditasi Sekolah Jumlah **30.000** lembaga

Akreditasi PNF Jumlah **10.000** sekolah

Bantuan Sarpras Lainnya (Pengembangan pendidikan karakter) Jumlah **4.561** paket

Substansi Pendidikan dan Kebudayaan

Empat Program untuk Penguatan

Selain akses dan mutu, substansi pendidikan dan kebudayaan tidak kalah penting untuk terus dikembangkan dan dikuatkan. Karena sejatinya substansi adalah inti dari pendidikan dan kebudayaan. Empat program ini meliputi, pengembangan dan perbaikan kurikulum, ujian nasional (UN), pengembangan rumah peradaban, dan implementasi kurikulum.

Sasaran Program Penguatan Substansi

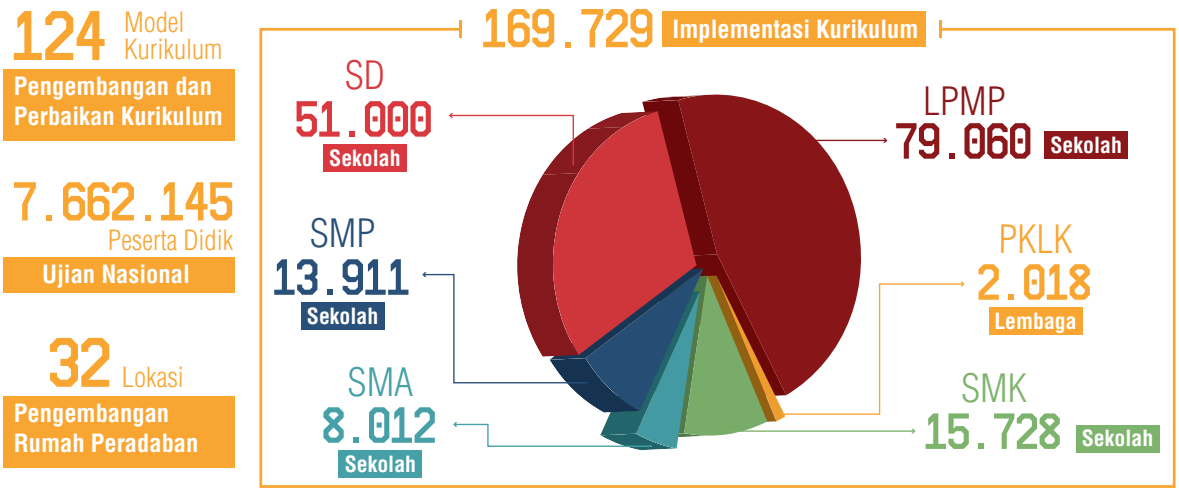

Tak tanggung-tanggung, untuk mendanai empat program penguatan substansi pendidikan dan kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalokasikan dana lebih dari Rp 2 triliun. Alokasi tersebut digunakan untuk pengembangan dan perbaikan 124 model kurikulum, dan implementasinya pada 169.729 sekolah/lembaga. Sekolah/lembaga sasaran impelementasi kurikulum meliputi jenjang SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Untuk ujian nasional, di 2017 ini ada 7,6 juta siswa yang akan berpartisipasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy telah mengeluarkan surat edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan UN tahun pelajaran 2016/2017 yang diprioritaskan melalui Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Terkait dengan ujian akhir peserta didik, ada tiga jenis ujian yang akan dilaksanakan yaitu UN, Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN), dan Ujian Sekolah (US). UN digunakan sebagai pemetaan, sedangkan USBN dan US digunakan sebagai penentu kelulusan peserta didik. USBN dan US semangatnya adalah mengembalikan peran guru dalam proses evaluasi siswa.

Tak kalah penting, penguatan substansi pendidikan juga menyentuh pengembangan rumah peradaban. Rumah Peradaban merupakan sarana edukasi dan pemasyarakatan hasil penelitian arkeologi untuk memberikan pemahaman tentang sejarah dan nilai budaya masa lampau kepada masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat lebih melek budaya dan mendorong pencerdasan bangsa, penumbuhan semangat kebangsaan, dan sumber inspirasi bagi pengembangan budaya yang berkepribadian.

Melalui penguatan substansi pendidikan dan kebudayaan pada empat program ini Kemendikbud berupaya terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan. Harapannya, agar generasi bangsa selain terdidik juga berbudaya. (*)

PAUD, Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Keluarga

Perluasan dan Peningkatan Mutu

Pendidikan Anak Usia Dini, program keaksaraan, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan keluarga merupakan salah satu program yang dijalankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selama 2017. Sebanyak Rp 549,5 miliar dialokasikan untuk melaksanakan program tersebut. Sasaran pelaksanaan program ini di tahun 2017 adalah untuk memperluas dan meningkatkan mutu PAUD, keaksaraan, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan keluarga.

Sasaran Program

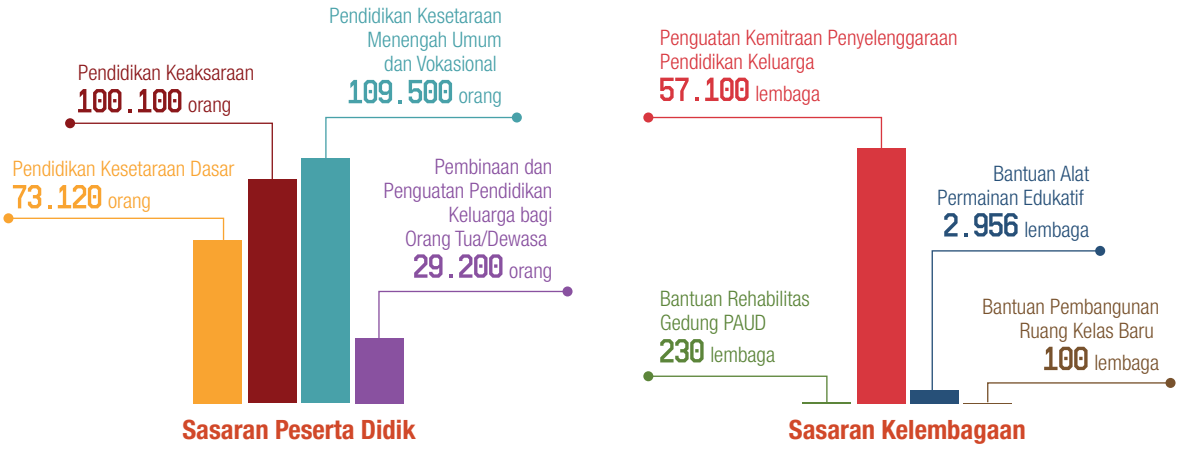

Setidaknya ada delapan program yang masuk dalam program PAUD, Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Keluarga. Delapan program tersebut terbagi menjadi empat dengan sasaran peserta didik, dan empat sasaran kelembagaan. Empat program dengan sasaran peserta didik, yakni Pendidikan Keaksaraan dengan sasaran 100.100 orang, Pendidikan Kesetaraan Dasar dengan sasaran 73.120 orang, Pendidikan Kesetaraan Menengah Umum dengan sasaran 109.500 orang, serta Pembinaan dan Penguatan Pendidikan Keluarga dengan sasaran 29.200 orang.

Selanjutnya empat program dengan sasaran kelembagaan adalah Penguatan Kemitraan Penyelenggaraan dengan sasarn 57.100 lembaga, Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD dengan sasaran 230 lembaga, Bantuan Alat Permainan Edukatif dengan sasaran 2.956 lembaga, dan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dengan sasaran 100 lembaga.

Di luar anggaran tersebut, untuk memperkuat kerja sama antara pusat dan daerah, Kemendikbud menetapkan program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat di daerah dengan sasaran di 34 provinsi di Indonesia. Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp 599,3 milar. Bentuk pembinaan misalnya menyelenggarakan pelatihan bagi guru-guru PAUD dan bantuan sarana praktik kursus bagi sanggar kegiatan belajar (SKB). (*)

INI CAPAIAN KEMENDIKBUD HINGGA AKHIR 2016

Selama 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berhasil menerjemahkan empat agenda prioritas yang tercantum dalam Nawacita dalam berbagai program. Keempat agenda prioritas itu adalah meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, melakukan revolusi karakter bangsa, dan memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Dalam empat halaman ini (17, 18, 19, dan 20), kami sajikan capaian program Kemendikbud selama 2016. Beberapa di antara program tersebut berhasil dicapai sesuai target, bahkan ada pula yang melebihi target. Selain empat agenda prioritas, Kemendikbud juga melakukan penguatan tata kelola dan partisipasi publik dengan capaian berupa status integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan Kemendikbud sebagai wilayah bebas dari korupsi (WBK), serta indeks kepuasan pemangku kepentingan yang mencapai angka 77.

Selain itu, sesuai amanat Presiden Joko Widodo, yaitu "Membangun dari Pinggiran", Kemendikbud juga memiliki program Sekolah Garis Depan (SGD) dan Guru Garis Depan (GGD) di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Hingga saat ini Kemendikbud telah membangun 114 SGD yang tersebar di 49 kabupaten/kota. Sementara pada program GGD, yaitu pengiriman guru ke daerah 3T, pada 2016, Kemendikbud merekrut sebanyak 6.296 guru sebagai salah satu upaya menjawab persoalan distribusi guru. (*)

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA

PENINGKATAN %
ANGKA PARTISIPASI KASAR

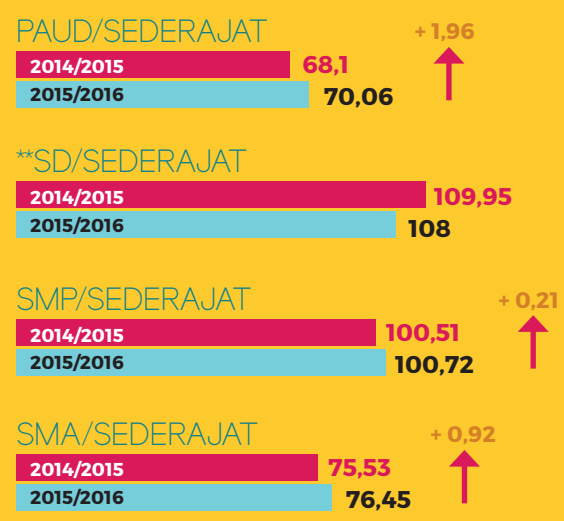

Dapodik, 2016

***Penurunan APK SD dikarenakan pertambahan penduduk usia 7-12 tahun*

PENINGKATAN
RATA-RATA LAMA SEKOLAH

USIA 25+

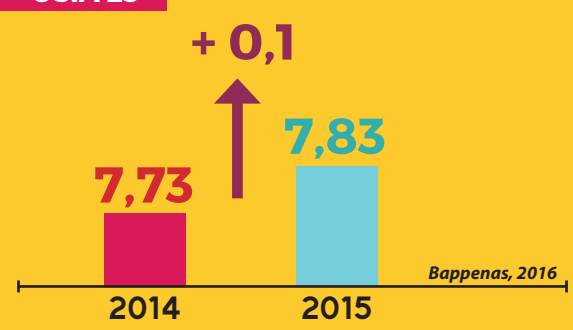

Bappenas, 2016

PENINGKATAN
HARAPAN LAMA SEKOLAH

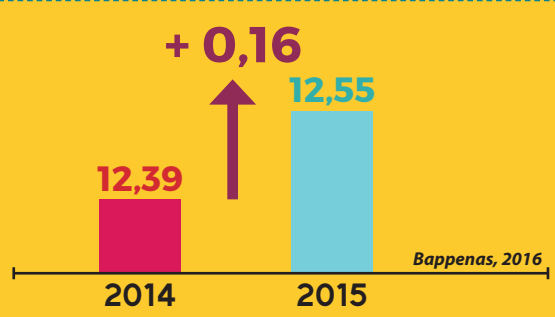

Bappenas, 2016

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA

	TARGET	REALISASI
KARTU INDONESIA PINTAR	17.927.308 anak	19.201.416 anak
UNIT SEKOLAH BARU	674 unit	657 unit
RUANG KELAS BARU	14.223 ruang	14.125 ruang
SERTIFIKASI GURU	25.000 guru	68.737 guru
PENINGKATAN KOMPETENSI GURU	500.000 guru	811.540 guru
TUNJANGAN PROFESI GURU (PNS / NON PNS)	1.508.498 guru	1.433.322 guru
AKREDITASI SEKOLAH & LEMBAGA	43.224 unit	44.377 unit
REHABILITASI RUANG KELAS	11.633 ruang	12.732 ruang

MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL

	RUANG KELAS BARU SMK	PENGEMBANGAN SMK KEMARITIMAN	UNIT SEKOLAH BARU SMK
** TARGET	5.662 ruang	50 sekolah	241 unit
** REALISASI	5.478 ruang	43 sekolah	216 unit

	PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIK	PENGEMBANGAN SMK PERTANIAN	SEKOLAH RUJUKAN
** TARGET	4.165 ruang	32 sekolah	2.002 sekolah
** REALISASI	3.086 ruang	42 sekolah	1.919 sekolah

MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA

	TARGET	REALISASI
PENERAPAN K13	57.160 sekolah	57.160 sekolah
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER	REALISASI 542 sekolah	
TRANSAKSI NON-TUNAI (PEMBELIAN BUKU)	Pembelian buku melalui e-katalog, dibiayai dana BOS	
PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA (PKK)	67.500 peserta	67.500 peserta
PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR	65.950 peserta	65.950 peserta
PENDIDIKAN KELUARGA	7.200 lembaga	7.200 lembaga
BANTUAN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN	24.700 orang	24.700 orang

MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL DI INDONESIA

	REVITALISASI DESA ADAT	PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA	FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA	REVITALISASI MUSEUM	LEMA (KOSA KATA) DALAM KAMUS DAN PENGEMBANGAN ISTILAH
**TARGET	139 desa	3.375 unit	334 komunitas	24 museum	152.566 lema
**REALISASI	139 desa	3.375 unit	334 komunitas	17 museum	152.566 lema

OPINI BPK	INDEKS KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN	NILAI LAKIP	TEROBOSAN TATA KELOLA
	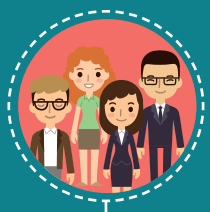		
TARGET WTP (WAJAR TANPA PENGECUALIAN)	77	TARGET 75	

- Penguatan **Pengawasan dan SPI** (Sistem Pengendalian Internal)
- Sosialisasi **Budaya Anti Korupsi**
- Peningkatan **Kualitas dan Kualifikasi Auditor dan Pengelola Keuangan**
- Penguatan ***e-Katalog, e-Planning, e-Office, Simbaja (Sistem Pengadaan Barang dan Jasa), Simkeu (Sistem Monitoring Keuangan), Simpeg (Sistem Manajemen Kepegawaian dan Kinerja)***
- Layanan **Unit Layanan Terpadu (ULT)**
- Keterbukaan informasi publik melalui platform digital **(Sekolah Kita, Jendela Pendidikan, Neraca Pendidikan Daerah, Neraca GTK, Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, e-PPID)**
- Layanan internal audit capability model (IACM), posisi 3 skala 5 dari BPKP
- Layanan publik zona hijau (Ombudsman)
- Pengarusutamaan Gender, penghargaan parahita ekapraya 2016 (Kemendikbud memperoleh penghargaan APE kategori Pratama bersama 2 Kementerian lainnya, 3 Pemprov dan 19 Pemkab/kota)

SEKOLAH GARIS DEPAN

Sekolah Garis Depan (SGD) adalah perwujudan **Nawacita ke-3** dengan pembangunan **sekolah di daerah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal)** dan juga daerah yang terdepan dari segi ekonomi.

Pembangunan **114 SGD** yang tersebar di 49 Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- **11 Unit sekolah Baru** (7 SMA, 2 SMK, 2 SLB)
- **103 Revitalisasi** (27 SD, 30 SMP, 25 SMA, 18 SMK, 3 SLB)

114 Lokasi terdiri dari:

- Daerah Perbatasan
- Daerah urban
- Daerah bersejarah

GURU GARIS DEPAN

Pengiriman GGD ke daerah 3T Indonesia merupakan salah satu upaya **pemerataan distribusi guru.**

Seleksi GGD Tahun 2016
6.296 guru

NAD : 218 guru (2015) 110 guru (2016)	BENGKULU : 47 guru	JATIM : 483 guru	KALTARA : 40 guru	SULTRA : 164 guru	MALUKU : 201 guru
SUMUT : 343 guru	SUMSEL : 103 guru	KALBAR : 1492 guru	NTB : 259 guru	SULTENG : 376 guru	PAPBAR : 189 guru (2015) 283 guru (2016)
SUMBAR : 148 guru	LAMPUNG : 108 guru	KALTENG : 39 guru	NTT : 289 guru (2015) 966 guru (2016)	GORONTALO : 126 guru	PAPUA : 101 guru (2015) 363 guru (2016)
RIAU : 304 guru	BANTEN : 39 guru	KALSEL : 96 guru	SULBAR : 13 guru	SULUT : 93 guru	
KEP. RIAU : 26 guru	JABAR : 39 guru	KALTIM : 13 guru	SULSEL : 97 guru	MALUT : 167 guru	

Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)

GTK Profesional dan Sejahtera Wujudkan Pembelajaran Bermutu

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) terus meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme GTK untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu, dan membentuk insan Indonesia yang berkarakter. Hal tersebut sesuai dengan visi Ditjen GTK, yakni "Terwujudnya Guru dan Pendidik Lainnya serta Tenaga Kependidikan yang Mulia, Profesional dan Sejahtera untuk Membentuk Insan Indonesia yang Berkarakter".

Sebagai wujud meningkatkan kesejahteraan dan profesionalime GTK, pada 2017 ini Kemendikbud mengalokasi anggaran senilai Rp 8 triliun. Anggaran tersebut terbagi-bagi dalam delapan program peningkatan kesejahteraan GTK, yaitu pemberian tunjangan profesi kepada 222.204 guru, bantuan kepada 115.811 guru non-PNS, tunjangan khusus kepada 26.561 guru, bantuan kualifikasi kepada 6.542 guru, dan bantuan sertifikasi kepada 115.000 guru.

Pada pemberian Tunjangan Profesi Guru, sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, pada Pasal 16 Ayat 1, akan diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik atau profesi guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selanjutnya Kemendikbud juga mengalokasikan anggaran untuk pengembangan profesionalisme guru kepada 3.000 kelompok kerja (KK) sebagai upaya peningkatan karir melalui KK yang terdiri dari Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Alokasi anggaran juga dibagi untuk program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T), serta memberikan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) kepada 821.233 orang. Total jumlah GTK yang disasar mencapai 1.314.851 orang.

Di luar anggaran tersebut, Kemendikbud juga memberikan bantuan untuk program peningkatan kompetensi GTK. Program ini menyasar sebanyak 803.373 orang. Melalui program-program penguatan GTK, diharapkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dapat terwujud. Semua itu untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik. (*)

Program bagi Guru dan Tenaga Kependidikan

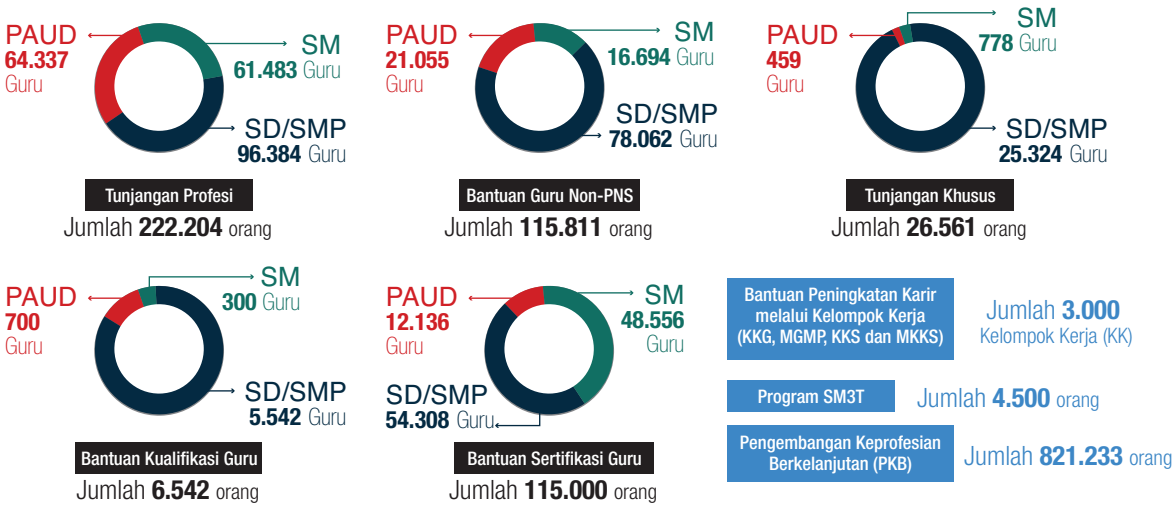

Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Peningkatan Peran Bahasa Indonesia untuk Perkuat Karakter Bangsa

Sejalan dengan nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam memperteguh kebinekaan dan melakukan restorasi sosial di Indonesia serta melakukan revolusi karakter bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya terus mengembangkan peran Bahasa Indonesia di dunia pendidikan nasional maupun internasional. Bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa pemersatu masyarakat Indonesia yang memiliki sekitar 707 bahasa daerah ini perlu terus dilestarikan guna memperkuat jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan hal itu, Kemendikbud mengalokasikan anggaran sebesar Rp 151,12 miliar. Anggaran tersebut untuk program-program pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Empat program di antaranya dilakukan sebagai upaya meningkatkan skor PISA *(Programme Internationale for Student Assesment)* tahun 2019 mendatang dengan target skor sebesar 414.

Keempat program tersebut adalah pengayaan kosakata/lema, penguatan literasi, dan program Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI). Program lainnya adalah peningkatan kemampuan pendidik Bahasa Indonesia dalam mendukung peningkatan nilai mata pelajaran bahasa Indonesia pada ujian nasional terutama di 10 provinsi dan nilai uji kompetensi guru yang masih rendah.

Selain empat program tersebut, Kemendikbud juga mendorong pemerintah daerah untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia melalui penyuluhan di 34 provinsi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga perlu dipopulerkan di kancah internasional yaitu melalui program BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing). Rencananya Badan Bahasa Kemendikbud akan mengirimkan sekitar 220 guru ke 29 negara di berbagai benua untuk mengajarkan bahasa Indonesia.

Melihat kondisi bahasa daerah yang semakin hari hampir punah, Badan Bahasa Kemendikbud menawarkan program Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah sebagai bentuk kerja sama kepada pemerintah daerah. Badan Bahasa Kemendikbud akan memberikan laporan kepada setiap kepala daerah tentang status bahasa daerah yang ada di masing-masing daerahnya. Misalnya, di daerah tertentu terdapat sejumlah bahasa daerah dengan status vitalitas bahasanya rendah, maka dapat bekerja sama dengan balai atau kantor bahasa Kemendikbud yang ada di setiap provinsi sesuai daerahnya.

Badan Bahasa Kemendikbud juga memfasilitasi sebanyak 79 lembaga yang bergerak di bidang Bahasa dan Sastra untuk memublikasikan karya atau kegiatan lainnya. Badan Bahasa Kemendikbud juga mendorong penguatan perpustakaan yang ada di balai atau kantor bahasa di seluruh Indonesia. (*)

Sasaran Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Pengayaan Kosakata/Lema
78,802 LEMA

Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing
220 ORANG

Konservasi dan Revitalisasi Bahasa Daerah
20 BAHASA

Pengutamaan Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang
514 KAB./KOTA

Program Literasi Penguatan
305 AJAR

Penguatan Mitra Kebahasaan dan Sastra
79 LEMBAGA

Peningkatan Tendik Bidang Bahasa
22,848 ORANG

Layanan Perpustakaan
1 LAYANAN

Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI)
2,500 ORANG

Program Kebudayaan

Landasan Perencanaan Pembangunan Pendidikan Berkelanjutan

Peran keragaman budaya Indonesia menjadi landasan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dalam segala lini pembangunan termasuk bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan nawacita dalam memperteguh kebinekaan dan melakukan restorasi sosial di Indonesia serta melakukan revolusi karakter bangsa.

"Kebudayaan adalah ruh, kebudayaan adalah payung. Membangun karakter harus dilandasi kebudayaan, kecerdasan, dan kearifan lokal. Kebudayaan harus diberi ruang lebar," tegas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy.

Posisi kebudayaan yang sangat penting dalam pendidikan itu menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Melalui Kemendikbud, tujuh program di bidang kebudayaan dirancang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 485,88 miliar. Pertama, program sarana kesenian di sekolah dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana kesenian tradisional di satuan pendidikan. Program dengan sasaran 225 sekolah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia ini bertujuan untuk menjaga kelestarian kesenian tradisional yang diajarkan melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

Kedua, program pembangunan dan revitalisasi museum di daerah yang akan menyasar 124 museum di Indonesia. Program ini memfasilitasi museum di daerah dalam hal perbaikan fisik, tata pamer, restorasi koleksi, dan sarana pendukung museum lainnya.
Ketiga, Museum Nasional sebagai ikon museum di tanah air juga akan direvitalisasi. Selain pembangunan dan perbaikan fisik, revitalisasi museum nasional juga dilakukan dengan memperbarui alur kisah museum. Nantinya, alur kisah museum yang baru itu diharapkan lebih menghidupkan kisah di balik artefak agar bisa menjadi jendela untuk memperkenalkan identitas bangsa Indonesia.

Keempat, revitalisasi 75 desa adat dengan tujuan untuk menghidupkan kembali aktivitas budaya masyarakat setempat, seperti membangun atau memperbaiki bangunan adat, kelengkapan adat serta ritual adat, dan lainnya. Kelima, melakukan revitalisasi pada empat taman budaya di Indonesia.

Alokasi juga diberikan untuk memfasilitasi 70 komunitas sejarah dan 140 komunitas budaya. Program fasilitasi ini dilakukan sebagai upaya apresiasi sejarah melalui aktivitas kesejarahan dan komunitas budaya dalam rangka pelestarian kebudayaan Indonesia. **(*)**

Sasaran Program Kebudayaan

Revitalisasi Taman Budaya	4 Taman Budaya
Pembangunan dan Revitalisasi Museum di Daerah	124 Unit
Pembangunan Museum Nasional	56,189 Unit
Fasilitasi Komunitas Sejarah	70 Komunitas
Fasilitasi Komunitas Budaya	140 Komunitas
Revitalisasi Desa Adat	75 Paket
Sarana Kesenian di Sekolah yang Difasilitasi	225 Sekolah

Beasiswa

Tersedia Rp 252,1 Miliar untuk Beasiswa Bagi yang Berprestasi

Tiga jenis beasiswa disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui alokasi anggaran fungsi pendidikan Tahun Anggaran 2017, yaitu sebesar Rp 252, 1 Miliar. Uniknya, ketiga beasiswa tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga tujuan investasi sumber daya manusia dan diplomasi dengan negara tetangga dapat terakomodasi.

Tiga beasiswa yang dimaksud meliputi Beasiswa Unggulan, program Darmasiswa, Beasiswa Bakat dan Prestasi. Beasiswa unggulan dialokasikan untuk 6.241 orang calon penerima. Mereka yang berhak mengikuti program inia dalah para juara peraih medali olimpiade internasional, peraih juara tingkat internasional, nasional, dan regional bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga. Kemudian, para guru, pegawai, karyawan, mahasiswa, maupun perorangan yang berprestasi. Selain itu, mahasiswa asing terpilih yang berasal dari negara sahabat yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan memenuhi persyaratan penerimaan oleh perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai akreditasi minimal B.

Program beasiswa lainnya berupa Darmasiswa dialokasikan untuk 650 mahasiswa asing yang berasal dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Sejak 1974 dijalankan, program ini berhasil menarik minat mahasiswa asing untuk mempelajari bahasa, kebudayaan, dan seni Indonesia. Mereka ditempatkan di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia yang ditunjuk.

Terakhir, alokasi anggaran Beasiswa Bakat dan Prestasi untuk 31.603 siswa. Jenis beasiswa ini diberikan kepada para siswa yang mendapat juara I, II, dan III di berbagai bidang pada tingkat provinsi atau nasional. Siswa dengan prestasi lain yang diakui pemerintah atau pihak lain yang terkait juga berhak mendapat beasiswa jenis ini. Prestasi yang dimaksud seperti mencegah tindak kejahatan, membantu aparat dalam menanggulangi bencana, atau melakukan sesuatu yang luar biasa sehingga diekspos oleh media massa. Beasiswa ini diberikan dengan harapan agar para siswa tersebut dapat mempertahankan, meneruskan, dan bahkan mengembangkan bakat dan prestasinya itu. **(*)**

Sasaran Penerima Beasiswa

BEASISWA UNGGULAN
6,241 ORANG

BEASISWA DARMASISWA
650 ORANG

BEASISWA BAKAT DAN PRESTASI
31,603 ORANG

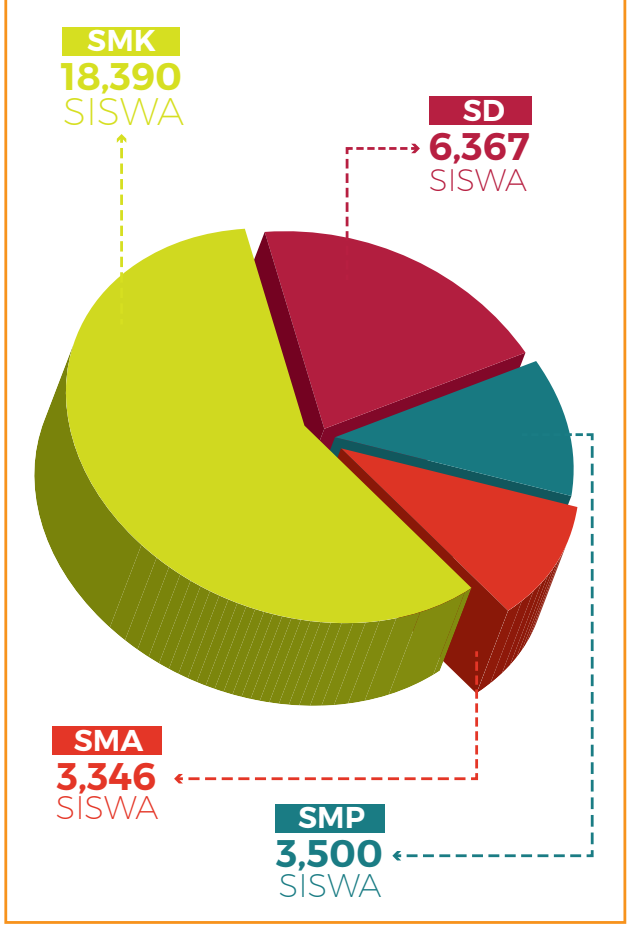

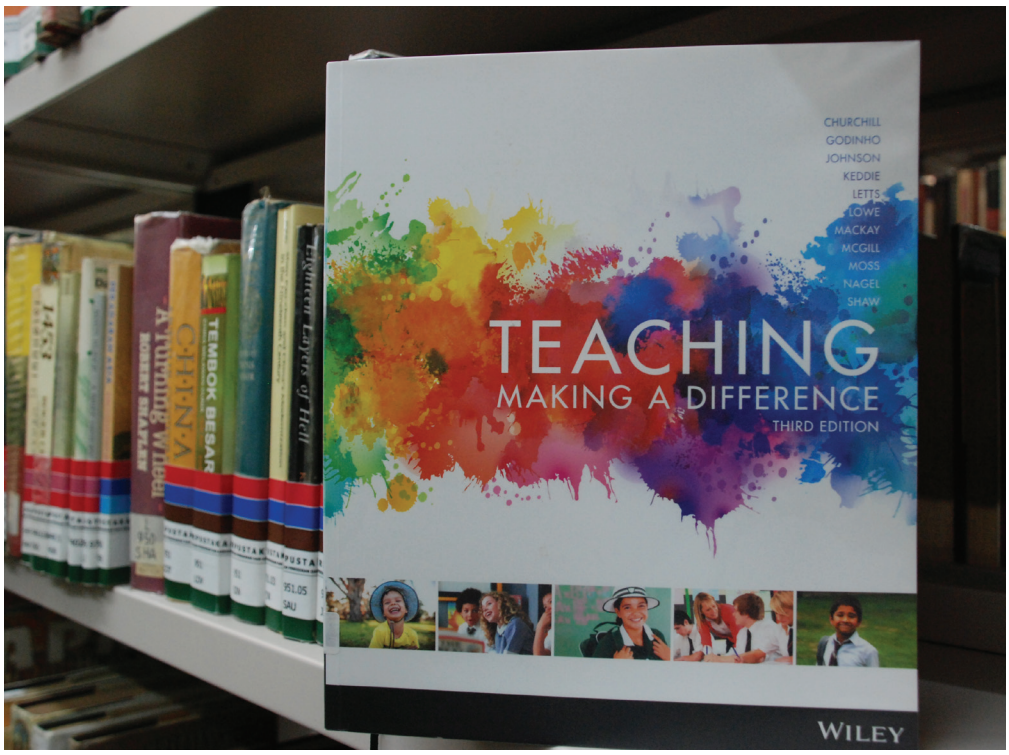

Judul: Teaching: Making a Difference (Third Edition)
Penulis: Rick Churchill, Sally Godinho, Nicola F. Johnson, Amanda Keddie, Will Letts, Kaye Lowe, Jenny Mackay, Michèle McGill, Julianne Moss, Michael C. Nagel, Kylie Shaw, Melissa Vick
Tahun Terbit: 2015
Penerbit: John Wiley & Sons, Inc.
ISBN: 9780730315452
Tebal: XIV, 641 hlm.
Ukuran: 26 cm
Bahasa: Inggris

RESENSI BUKU

Membuat Perbedaan, Menjadi Guru Berkualitas

Dalam mengajar generasi milenial, guru yang dianggap hebat adalah guru yang memiliki beragam kemampuan, pemahaman, ide, dan pengetahuan. Tidak hanya mampu mengantarkan materi yang diajar, guru juga harus mampu membantu siswa mengaplikasikan pemahamannya dalam kehidupan, serta keterkaitannya dengan pelajaran lain.

Buku *Teaching: Making a Difference* edisi ketiga ini dirancang untuk mendampingi para calon guru dalam pendidikan keguruan untuk menjalani pembelajaran sehingga menjadi guru yang terus berupaya memberikan hasil belajar yang berkualitas. Seri buku *Teaching: Making a Difference* ini merupakan rangkuman perjalanan dan perubahan dalam pengembangan kurikulum pendidikan guru di Australia.

Buku *Teaching: Making a Difference* edisi ketiga ini disusun oleh akademisi di bidang pendidikan di Australia, sehingga pembahasan mengenai efektivitas pola pengajaran dan profesionalisme dalam pengajaran yang dibahas di bab empat merupakan pengalaman nyata, pengetahuan dan wawasan yang benar-benar bisa diterapkan dalam pendidikan dan pengajaran di kelas.

Buku ini dapat membantu pembacanya dalam memahami aspek apa saja yang dapat menjadikan mereka guru yang unggul. Buku *Teaching: Making a Difference* sangat disarankan bagi mahasiswa dan pengajar di bidang pendidikan keguruan dalam mengahadapi berbagai tantangan di dalam dan luar ruang kelas, mengembangkan kreativitas juga teknik dalam mengajar. Masyarakat dapat memanfaatkan buku ini dengan datang ke Perpustakaan Kemendikbud Gedung A lantai Mezzanine. Untuk mengecek status ketersediaan buku, pindai QR code berikut melalui ponsel pintar Anda.

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN SMA/MA

KOLEKSI

Sesuai Standar Nasional Perpustakaan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS) yang dikeluarkan pada tahun 2013 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Standar Koleksi Perpustakaan SD/MI adalah sebagai berikut:

JENIS

Buku (buku teks, buku penunjang kurikulum, buku bacaan, buku referensi dan buku biografi);

Terbitan berkala (majalah, surat kabar);

Audio visual;

Multimedia.

JUMLAH

Perpustakaan memperkaya koleksi dan menyediakan bahan perpustakaan dalam berbagai bentuk media dan format

- buku teks 1 eksemplar per mata pelajaran per peserta didik
- buku panduan pendidik 1 eksemplar per mata pelajaran per guru bidang studi
- buku pengayaan dengan perbandingan 70% nonfiksi dan 30% fiksi, dengan ketentuan bila 3 sampai 6 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 1.000 judul, 7 sampai 12 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 1.500 judul, 13 sampai 18 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 2.000 judul, 19 sampai 24 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 2.500 judul

Perpustakaan menambah koleksi buku per tahun dengan ketentuan semakin besar jumlah koleksi semakin kecil prosentase penambahan koleksinya (1.000 judul penambahan sebanyak 10%; 1.500 judul penambahan sebanyak 8%; 2.000 judul sampai dan seterusnya penambahan sebanyak 6%).

Perpustakaan melanggan minimal dua judul majalah dan dua judul surat kabar.

CACAH ULANG DAN PENYIANGAN

Perpustakaan melakukan cacah ulang dan penyiangan koleksi perpustakaan sekurang- kurangnya sekali dalam satu tahun.

PENGORGANISASIAN BAHAN PERPUSTAKAAN

Bahan perpustakaan dideskripsikan, diklasifikasi, diberi tajuk subjek dan disusun secara sistematis dengan mengacu pada:

- Pedoman deskripsi bibliografis dan penentuan tajuk entri utama (Peraturan Pengatalogan Indonesia);
- Bagan klasifikasi Dewey (Dewey Decimal Classification)\ c) pedoman tajuk subjek.
- Pedoman tajuk subjek.
- Format metadata (Indomarc)

BAHAN PERPUSTAKAAN REFERENSI

Perpustakaan menyediakan bahan perpustakaan referensi. Koleksi bahan perpustakaan referensi minimal meliputi kamus umum bahsa Indonesia dan kamus bahasa bahasa Inggris-Indonesia, kamus bahasa Indonesia-Inggris, kamus bahasa daerah, kamus bahasa Jerman-Indonesia, kamus bahasa ndonesia-Jerman, kamus bahasa Prancis-Indonesia, kamus bahasa Indonesia-Prancis, kamus bahasa Jepang-Indonesia, kamus Indonesia-Jepang, kamus bahasa Mandarin-Indonesia,kamus bahasa Indonesia-Mandarin, kamus bahasa Indonesia-Arab, kamus bahasa Arab-Indonesia, kamus subyek, ensiklopedi umum dan khusus, biografi tokoh, atlas, peta, kamus ilmu bumi (gasetir), kitab suci, peraturan perundang-undangan, direktori dan almanak.

PERAWATAN

Perpustakaan melakukan perawatan bahan perpustakaan dengan cara pengendalian kondisi ruangan berupa menjaga kecukupan cahaya dan kelembaban udara.

Perpustakaan melakukan perbaikan bahan perpustakaan yang rusak minimal satu tahun sekali.

Festival Europalia 2017-2018

Indonesia Jadi Negara Tamu Pertama di Asia Tenggara

Indonesia menyapa dunia dan mewarnai budaya serta peradaban global melalui keragaman dan kekhasan budayanya pada Festival Europalia. Europalia merupakan festival seni berskala internasional, terbesar, termegah, dan bergengsi yang diselenggarakan dua tahun sekali sejak tahun 1969 di Belgia dan daratan Eropa lainnya. Tahun ini Indonesia terpilih menjadi negara tamu (guest country) pertama di Asia Tenggara dan negara keempat di Asia setelah Jepang, Tiongkok, dan India.

Tahun 2012, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brusel memulai pendekatan kepada Europalia Internasional, sebuah lembaga nirlaba internasional penyelenggara Festival Europalia. Dari sana terjalin kesepakatan yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI yang diwakili oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Europalia Internasional pada 14 Juli 2015.

Melalui kesepakatan itu, terbentuk Europalia Indonesia yang merupakan tim penunjang kegiatan Festival Europalia. Selanjutnya pada 7 Desember 2015, disepakati kerangka acuan kerja (*framework agreement*) antara Kemendikbud dan Europalia Internasional, meliputi organisasi, rencana program, tanggung jawab, pendanaan, dan sponsor dalam penyelanggaraan festival budaya internasional tersebut.

Tim Europalia Indonesia terus bergerak. Pada 28 Januari 2016, tim melakukan pembahasan tema Festival. Tema Festival Europalia Indonesia adalah "Peninggalan Nenek Moyang dan Kebhinekaan Indonesia". Melalui tema tersebut, Indonesia ingin menampilkan dirinya sebagai negara multikultur yang toleran, demokratis, dan modern, namun tetap menjunjung khasanah seni dan budaya.

EUROPALIA
ARTS FESTIVAL
INDONESIA
10/10/2017 - 21/01/2018

APA ITU EUROPALIA FESTIVAL

- Festival seni internasional yang diselenggarakan sejak tahun 1969 di **Belgia dan negara-negara Eropa** lainnya dengan mengundang Negara Tamu dan berlangsung selama **4 bulan**.
- Mencakup berbagai disiplin kesenian: **seni rupa, seni pertunjukan (musik, tari, teater), sastra, film,** juga **seminar.**
- Kesenian yang ditampilkan bisa dalam bentuk **tradisi, kontemporer, kreasi baru**, dan **kolaborasi.**
- Indonesia merupakan negara ke-8 di luar Uni Eropa, dan negara ASEAN pertama yang menjadi negara tamu setelah Jepang (1989), Meksiko (1993), Rusia (2005), China (2009), Brasil (2011), India (2013) dan Turki (2015).
- Indonesia terpilih menjadi negara ke-4 di Asia, dan **negara pertama** di Asia Tenggara yang menjadi **Negara Tamu**

Menjadi negara tamu tentu merupakan kesempatan berharga. Tidak seperti negara lainnya, Indonesia yang terpilih sebagai negara tamu mendapatkan berbagai keuntungan. Selain dapat membentuk Europalia Indonesia, Indonesia juga diberikan dua lokasi penampilan utama di dua kota di Belgia, yaitu Brussel dan Antwerpen. Di dua tempat inilah nanti akan didekorasi khas Indonesia. Selain itu Indonesia juga diberikan kebebasan mengelola beragam pertunjukan yang akan ditampilkan selama festival berlangsung dalam semangat kolaborasi dengan Europalia Indonesia.

Keterlibatan dalam festival bergengsi ini tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga budayawan, perguruan tinggi, pengusaha, dan pemerintah daerah. Kegiatan akan berjalan dengan baik dengan melibatkan tiga unsur yang saling menunjang yaitu Europalia Internasional, Europalia Indonesia, dan tempat penyelenggara (*venue*).

Dalam rangka menyukseskan festival tersebut, pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan menyediakan anggaran untuk kegiatan Europalia Indonesia 2017. Di samping itu, sesuai dengan kerangka acuan kerja Europalia Indonesia berkontribusi sebesar 300.000 euro.

Empat Bulan Penuh

Festival ini berlangsung selama empat bulan, mulai 10 Oktober 2017 hingga 21 Januari 2018. Tidak hanya di Belgia, festival ini juga digelar di sejumlah kota lainnya di daratan Eropa. Bagi Indonesia, festival ini diharapkan dapat mengembangkan diplomasi budaya Indonesia di kancah dunia. Indonesia akan memperkenalkan produk ekonomi

EUROPALIA 1969-2015

25 **festival**

35 **negara tamu**

9.573 **event**
(termasuk 565 pameran)

1.108.899
pengunjung terbanyak
(Europalia Rusia 2005)

472.517
pengunjung
paling sedikit
(Europalia Turki)

kreatif, ekspor produk nasional lainnya, investasi dan pariwisata.

Negara ribuan pulau ini juga menampilkan berbagai pementasan seni budaya selama empat bulan secara intensif. Kesenian yang ditampilkan berupa seni rupa, seni pertunjukan (musik, tari, teater), sastra film dalam bentuk *workshop*, seminar, tradisi, kontemporer, kreasi baru, dan kolaborasi.

Europalia Indonesia melibatkan kurang lebih 800 orang yang akan terbagi dalam *venue* pameran yang berjumlah 22 stan, 100 konser musik, tari/ pertunjukan teater berjumlah 60, film 120, dan sastra 110. Festival gastromoni yang baru diadakan pertama kali di Europalia juga akan turut dimeriahkan melalui berbagai kuliner khas Indonesia.

Ada 15 orang terpilih sebagai tim kurator Europalia Indonesia yang kompeten di bidangnya antara lain arkeolog Daud Tanudiharjo untuk pameran warisan budaya, musisi Nyak Ina Raseuki selaku kurator musik, penari Sal Murgiyanto sebagai kurator tari dan sastrawan Afrizal Malna selaku kurator teater. Masing-masing kurator telah melakukan seleksi terhadap kelompok kesenian yang akan tampil dalam acara. Kesenian yang tampil di antaranya Tari Salman, Tari Legong, Tari Kecak, wayang kulit, dan pencak silat.

Melalui pameran dan berbagai pertunjukkan yang digelar di festival tersebut, Indonesia akan menampilkan kebudayaan mulai dari nenek moyang, kekuatan dalam budaya, dan kehidupan maritim Indonesia dengan 150 artefak yang Indonesia miliki. Pameran maritim Europalia Indonesia menampilkan jalur kejayaan penjualan rempah-rempah dan maritim yang bertempat di Museum La Bouverie di Liege, Belgia.

Pameran heritage sendiri akan ditempatkan di Teater Istana Palais des Beaux-arts (Bozar) yang merupakan salah satu tempat prestisius di Brussel, Belgia. Salah satu lukisan yang akan dipamerkan adalah lukisan Pangeran Diponegoro.

Sementara pameran komik digelar di Comic Art Museum. Pameran komik juga dipilih menjadi salah satu yang diunggulkan karena komik Indonesia belum banyak diketahui dunia sedangkan komik sangat popular bagi masyarakat Belgia. Adapun di bagian kuliner, salah satu yang akan diperkenalkan adalah kopi khas Indonesia.

Bagi Kemendikbud, kesempatan emas ini akan dimanfaatkan dengan baik. Festival Europalia tepat dijadikan sebagai media penjenamaan kembali (*rebranding*) Indonesia dan untuk mengembangkan diplomasi budaya, terutama kepada masyarakat di Eropa Barat. Masyarakat Indonesia yang beragam menunjukan kekayaan budaya yang saling harmonis dan toleransi di dalam kehidupan modern. sDengan beragam penampilan unik dan khas Indonesia sebagai negara tamu, Kemendikbud menargetkan sebanyak 1 juta orang berkunjung menyaksikan festival yang tahun ini merupakan penyelenggaraan ke-26 kalinya. **(*)**

Mengapa Indonesia bangga menjadi bagian dari Festival Europalia?

- Indonesia adalah negara pertama dari Asia Tenggara untuk berpartisipasi dalam Europalia Arts Festival.
- Disaksikan oleh jutaan mata dari seluruh Eropa dan dunia.
- Dikenal sebagai jantung Eropa, Brussel sebagai kota pembukaan festival adalah tempat yang tepat untuk mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia kepada dunia.
- Sebuah momentum besar dalam mempromosikan pariwisata, produk kreatif ekonomi, produk lainnya, dan peluang investasi.
- Sebuah kesempatan emas bagi Indonesia untuk menampilkan dan memperkenalkan seluruh budaya Indonesia.

Hasil Penelitian

Dukungan Pendanaan yang Baik, Ciptakan Lembaga PAUD Berkualitas

Oleh: J.M. Tedjawati
Peneliti pada Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemendikbud

Kemajuan bangsa akan tercapai dalam jangka panjang apabila diawali dengan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) sedini mungkin. Itulah mengapa memberikan pendidikan bagi anak usia dini sangatlah penting. Usia 0-6 tahun merupakan masa emas bagi tumbuh kembang anak yang sangat menunjang keberhasilan di masa datang. Pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD) apakah juga dibarengi dengan pendanaan yang memadai? Penelitian ini ingin melihat sejauh mana perhatian pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya terhadap PAUD.

Menggeliatnya pendidikan bagi anak usia dini (PAUD) di Indonesia mulai tampak pada periode tahun 1998-2003 senyampang dengan otonomi pendidikan, yang berpengaruh terhadap tata kelola penanganan PAUD di pusat maupun di daerah-daerah. Pada periode tersebut pemerintah mulai mendukung berkembangnya PAUD jalur pendidikan nonformal dalam bentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan satuan PAUD sejenis dalam bentuk pengintegrasian layanan PAUD dengan Posyandu.

Pemerintah pusat melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah memberikan berbagai dana bantuan seperti rintisan dan penguatan program, bantuan kelembagaan, bantuan kerja sama, bantuan pusat unggulan program PAUD dan lainnya (Direktorat Pembinaan PAUD, 2009). Selain itu, masih ada bantuan dana dari pihak lain, seperti dari Bank Dunia melalui program pendidikan dan pengembangan anak usia dini di mana pemerintah kabupaten/kota diharuskan menyediakan dana sharing.

Dalam pemenuhan pendanaan PAUD, berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun lembaga penyelenggara PAUD sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Penelitian ini ingin mengungkap: (1) siapa yang berkontribusi sebagai sumber pendanaan dalam penyelenggaraan PAUD?; dan (2) bagaimana pemanfaatan dana tersebut? Studi ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan sumber-sumber pendanaan penyelenggaraan PAUD; dan (2) pemanfaatan kontribusi dana dari berbagai sumber.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus bertujuan untuk mempertahankan keutuhan objek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka "studi kasus", dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Tujuannya untuk pengembangan pengetahuan yang mendalam mengenai objek yang bersangkutan, sehingga studi kasus dapat digolongkan sebagai penelitian eksploratif dan deskriptif (Vredenbregt, 1987).

Atas dasar pendangan yang diacu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data tentang sumber pendanaan penyelenggaraan PAUD diperoleh dengan menggunakan pedoman wawancara dan daftar isian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul

diolah sesuai dengan jenis data yang terkumpul.

Sementara untuk data kuantitatif, pengolahan dilakukan melalui prosedur pemeriksaan data, klasifikasi data, dan tabulasi data. Klasifikasi data meliputi sumber pendanaan penyelenggara PAUD dan besaran dana dari masing-masing sumber.

Data yang diolah, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis meliputi besar dana dan bentuk kontribusi menurut sumber dan penggunaannya. Sumber dana dikelompokkan menjadi dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga PAUD.

Penelitian ini dilakukan pada 2011 di Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Bogor, Kota Serang, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Manggarai, Kota Bitung, dan Kabupaten Bone. Daerah penelitian tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kepedulian pemerintah daerah terhadap penyelengaraan dan perkembangan PAUD dilihat dari pendapatan asli daerah, terutama kontribusi pendanaan bagi PAUD. Masing-masing daerah diambil sampel dua TK, dua KB, dua TPA, dan dua satuan PAUD sejenis.

Sumber data berasal dari kepala bidang atau kepala seksi dinas pendidikan kabupaten/kota yang menangani PAUD, penyelenggara/pengelola PAUD, pendidik PAUD, orang tua anak usia dini yang mendapat layanan PAUD, dan Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi).

Hasil Penelitian

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa sumber dana penyelenggaraan PAUD umumnya berasal dari: (1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota); (2) masyarakat seperti dari tokoh masyarakat, instansi terkait, dunia usaha dan industri; dan (3) lembaga PAUD sendiri.

Sumber dana dari pemerintah pusat diberikan kepada lembaga PAUD secara langsung, seperti dana bantuan rintisan PAUD atau dana PAUD percontohan, setelah melalui prosedur tertentu. Meski bantuan sudah diberikan, namun masih ada beberapa penyelenggara PAUD yang belum mendapat informasi bagaimana mengajukan bantuan dana tersebut.

Sementara itu, pendanaan yang bersumber dari masyarakat umumnya diperoleh melalui peran serta tokoh masyarakat/agama/kepala desa, organisasi keagamaan (gereja atau masjid), instansi terkait seperti dinas kesehatan, dan dunia usaha/industri. Sumber dana tersebut diperoleh melalui hubungan pribadi (perkenalan) ataupun pengajuan proposal yang ditujukan kepada instansi terkait ataupun dunia usaha/industri.

Hal ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam pendanaan PAUD sangat mendukung keberlangsungan penyelenggaraan PAUD, terutama masyarakat di sekitar lembaga PAUD. Hal ini sesuai dengan keberadaan lembaga PAUD, yang didirikan oleh masyarakat. Namun demikian, besar penerimaan dana pada masing-masing lembaga penyelenggara PAUD masih sangat bervariasi.

Pada awalnya, beberapa lembaga penyelenggara PAUD dari sampel tidak menarik biaya dari orang tua murid. Namun, kondisi tersebut sulit dipertahankan karena anggaran yang berasal dari bantuan pemerintah maupun masyarakat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan bahan ajar peserta didik. Kebutuhan lain seperti honor para pendidik dan tenaga kependidikan tidak dapat terpenuhi.

Bentuk bantuan dana yang diperoleh dari orang tua, yaitu berupa iuran bulanan, sumbangan sukarela yang dapat berupa uang atau barang (bahan sembako, seperti beras, kacang ijo, susu), bantuan tenaga, dan sebagai narasumber. Umumnya uang iuran dari orang tua digunakan untuk operasional penyelenggaraan PAUD.

Saran

Dari hasil penelitian ini ada dua hal yang disarankan. Pertama, pemerintah sebaiknya menganggarkan dana secara proporsiaonal sesuai dengan program. Pemerintah juga perlu membedakan besaran bantuan terhadap tingkat kemajuan penyelenggara PAUD.

Kedua, sebaiknya pemerintah maupun masyarakat, khususnya dunia usaha dan industri dalam program tanggung jawab sosial perusahaannya tidak hanya mengalokasikan dana bantuan untuk alat permainan edukatif serta honor pendidik dan tenaga kependidikan. Pembangunan, perbaikan gedung, pelatihan dan keterampilan bagi penyelenggara dan pendidik PAUD juga sangat dibutuhkan untuk dibantu. Ada baiknya penyelenggara PAUD dapat lebih aktif dalam penggalian dana dari masyarakat tersebut. (*)

Jika Anda tertarik membaca secara utuh hasil penelitian ini, pindai QR code ini.

Bentuk bantuan dana yang diperoleh dari orang tua, yaitu berupa iuran bulanan, sumbangan sukarela yang dapat berupa uang atau barang (bahan sembako, seperti beras, kacang ijo, susu), bantuan tenaga, dan sebagai narasumber.”

Penggunaan Kata Depan dan Awalan *di* dan *ke* yang Benar

Penggunaan *di* dan *ke* dalam bahasa Indonesia dibagi dalam dua jenis, yaitu sebagai kata depan dan sebagai awalan. Jika digunakan sebagai kata depan, *di* dan *ke* ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Biasanya, *di* dan *ke* sebagai kata depan merupakan penunjuk tempat dan merupakan jawaban dari pertanyaan di mana atau ke mana?

Di kontrakan >< Dikontrakan
Kontrakan (tempat)
Artinya: yang dikontrak atau disewa (tentang rumah dan sebagainya)

Kesekolah >< **Ke sekolah**
Sekolah (tempat)
Artinya: bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran

Petunjuk lain yang dapat digunakan untuk menentukan apakah *di* dan *ke* sebagai kata depan adalah apabila *di* dan *ke* diganti dengan *dari,* maka akan terdengar lazim.

Misal: di kontrakan, ke kontrakan, dari kontrakan
Di sekolah, ke sekolah, dari sekolah
Di rumah, ke rumah, dari rumah

Untuk kata *kemari* meskipun merupakan penunjuk arah, namun jika diganti dengan di mari, atau dari mari maka akan terdengar tidak lazim. Oleh karena itu penulisannya tetap serangkai.

Cara penulisan kata *keluar*, ada dua macam. Jika merupakan lawan kata dari *masuk*, maka ditulis serangkai. Jika sebagai lawan kata dari *ke dalam*, maka ditulis terpisah. Tergantung konteks kalimatnya.

Ibu **keluar** rumah bersama adik
Ibu bertamasya **keluar** kota.
Kakak sudah **keluar** dari kantor tempatnya bekerja selama ini.
Kakak memandang **keluar** kelas.

Sedangkan *di* dan *ke* sebagai awalan penulisannya serangkai dengan kata yang mengikutinya.

Di jual >< **Dijual**
Kata dasar: Jual
Artinya: tukar sesuatu dengan uang

Dikontrakkan>< Dikontrakkan
Kata dasar: Kontrak
Artinya: perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya

SENARAI KATA SERAPAN

Bentuk Serapan	Bentuk Asal	Bahasa	Arti
Istiwa	Istiwā'	Arab	*a* paralel
dresoar	dressoir	Belanda	*n* bufet
loleng	Lólëng	Cina	*n Cn* pelita yang berkurung kertas; tanglung; lampion
pikolo	piccolo	Inggris	*n* seruling kecil yang bernada satu oktaf lebih tinggi daripada suling biasa
boseta	boceta	Portugis	*n ark* keranjang atau peti kecil
baiduri	waidūrya	Sansekerta-Jawa Kuna	batu permata yang berwarna dan banyak macamnya seperti -- bulan, -- pandan, -- sepah
kunci	kuñjī	Hindi	1. *n* alat untuk mengancing pintu, peti, dan sebagainya, terdiri atas anak kunci dan induk kunci 2. *n* alat yang dibuat dari logam untuk membuka atau mengancing pintu dengan cara memasukkannya ke dalam lubang yang ada pada induk kunci; anak kunci 3. dll
tesmak	cašmak	Parsi	*n* kacamata
metai	Metthai	Tamil	*n ark* kasur (bantal untuk alas duduk dan sebagainya)

Perlu informasi mengenai anggaran pendidikan serta layanan pendidikan dan kebudayaan lainnya?
Hubungi nomor-nomor berikut:

Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Anggaran
Telepon: 021-3866117
Faksimili: 021-3505118
Posel: ppid_dja@kemenkeu.go.id
Laman: anggaran.depkeu.go.id/dja/

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Laman: bos.kemdikbud.go.id
Telepon : 0-800-140-1299 dan 0-800-140-1276 (bebas pulsa), 021-5725980 dan 021-5725632
Faksimili : 021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
Posel : bos@kemdikbud.go.id

Program Indonesia Pintar (PIP)
Laman: indonesiapintar.kemdikbud.go.id
SMS: 0857-7529-5050, 0811-976-929
dengan format: Provinsi#Kabupaten/Kota#NomorKIP#NamaPenerima#IsiPesan
Posel: pengaduan@kemdikbud.go.id
Lapor!: lapor go.id SMS 1708

Unit Layanan Terpadu
Telepon: 021-5703303
Faksimili: 021-5733125
SMS: 0811976929
Posel: pengaduan@kemdikbud.go.id
Laman: http://ult.kemdikbud.go.id

PPK adalah Solusi

Menempatkan kembali karakter sebagai ruh pendidikan
berdampingan dengan intelektualitas,
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)
berperan membentuk generasi yang tangguh,
cerdas, dan berkarakter.

**Kunjungi portal PPK untuk berbagi praktik baik,
menjaring informasi dan menjadi wadah edukasi terkait pendidikan karakter.**

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id

ISSN: 2502-7867

18th ASIAN GAMES
Jakarta
Palembang
2018